

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa keputusan Filipina dalam bekerja sama dengan ASEAN merupakan keputusan strategis yang cuup rasional. Ini karena Filipina didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi ancaman cyber yang meningkat di tengah keterbatasannya dalam kapasitas nasional, juga dengan adanya keberhasilan pemerintah dalam mengatasi isu cyber sebagai ancaman eksistensial. Kerja sama ini sendiri diperlihatkan dengan efektif melalui Rational Choice Theory (RCT). Filipina yang memilih kerja sama regional karean langkah ini menawarkan utilitas (keuntungan) yang jauh lebih besar dan meminimalkan adanya kerugian potensial di kemudian hari dibandingkan jika bertindak secara unilateral.

Melalui kerja sama ASEAN juga, Filipina bisa memperoleh manfaat nyata berupa peningkatan kapasitas teknologi, efisiensi biaya dalam pengembangan sistem keamanan, akses pada early warning system, serta legitimasi politik sebagai bagian dari komunitas regional yang berkomitmen pada keamanan digital. Dan melalui kerja sama ini, ancaman cyber yang bersifat transnasional seperti adanya serangan ransomware dan kebocoran data, yang bisa menimbulkan biaya ekonomi dan keamanan yang sangat tinggi bisa diminimalkan. Sehingga, dengan kapasitas nasional Filipina yang masih tertinggal, tindakan mandiri (unilateral) hanya akan menghasilkan ketidakseimbangan negative atau kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, kolaborasi regional menjadi pilihan yang paling efisien dan rasional untuk bisa dilakukan oleh Filipina.

Dan jika dilihat dari kesiapan dan peran kerjasama ASEAN, secara kelembagaan, Filipina sudah meunjukkan pergeseran paradigma yang tadinya hanya sebatas permasalahan teknis IT biasa menjadi ancaman nasional, sehingga menghasilkan Cyber Resiliene yang sejalan dengan kerangka kerja ASEAN. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan Departement of Information and Communications Technology (DICT) dan Computer Emergency Response Team (CERT-PH), yang menandai isu cyber dari masalah teknis menjadi isu keamanan nasional. Proses ini sesuai dengan Securitization Theory, yang di mana pemerintah Filipina melakukan speech act dan menghasilkan policy act untuk mengonstruksikan ancaman cyber sebagai ancaman eksistensial terhadap negara. Peran kerja sama ASEAN sangat krusial dalam mendukung ketahanan cyber Filipina, terutama melalui mekanisme seperti ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy (ACCS).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang penulis temukan dari penelitian di atas, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Penulis menyarankan agar Filipina bisa memperkuat aspek regulasi dan penegakan hukum mereka dalam meningkatkan efektivitas cyber resilience. Di mana pemerintah perlu mengatasi kelemahan mereka dalam proses penegakan hukum dan koordinasi antar-lembaga yang saat ini masih menghambat proses sekuritisasi. Perlu adanya harmonisasi dan Implementasi komprehensif dari National Cybersecurity Plan (NSCP) 2023-2028.

Penulis juga menyarankan untuk Filipina memfokuskan investasi mereka dalam program capacity building dan pelatihan teknis yang spesifik dalam memanfaatkan dukungan teknis dan pertukaran pengetahuan yang disediakan oleh ASEAN. Ini karena Filipina yang masih terbatas dalam Sumber Daya Manusia dan infrastrukturnya membuat Filipina rentan, sehingga investasi spesifik perlu dilakukan. Dan untuk ASEAN, penulis menyarankan untuk merancang inisiatif kerja sama yang lebih terfokus dan inklusif, yang memberikan perhatian khusus pada negara-negara anggota yang masih tertinggal secara digital. Tanpa perhatian pada capacity gap, inisiatif regional akan berisiko menciptakan kesenjangan baru dalam tata kelola ruang siber regional dan menghambat tujuan ketahanan kolektif.

Kemudian untuk penelitian lebih lanjut, penulis menyarankan untuk menganalisis secara mendalam dampak spesifik dari implementasi program capacity building ASEAN, apakah terhadap penurunan insiden siber atau peningkatan peringkat Filipina dalam indeks keamanan siber global. Hal ini akan memberikan gambaran kuantitatif mengenai efektivitas yang diperoleh Filipina dari kerja sama regional.